

# **BINGKAI PEMBERITAAN PENDEMO UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DI SURABAYA PADA MEDIA SIBER DETIKJATIM**

Ardian Dwi Kurnia, Wiwid Noor Rakhmad  
contact.ardiandk@gmail.com

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)  
746407 Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email:  
fisip@undip.ac.id

## **ABSTRACT**

*The revision of Law No. 34/2004 on the TNI, passed on March 20, 2025, triggered protests in Surabaya that ended in clashes with security forces. The legacy of Dwifungsi ABRI and the swift legislative process raised public concerns over renewed military dominance. Cyber media plays a key role in shaping public opinion through framing. Using Robert M. Entman's framing analysis on 24 detikJatim news reports, the study found a negative framing of protestors: portraying protests as public disorder (define problems), blaming them for clashes (diagnose causes), depicting them as anarchic (moral judgement), and emphasizing firm security actions (treatment recommendations). This framing weakened civil society's legitimacy and reflected a lack of press social responsibility, highlighting the need for more balanced and independent media coverage.*

**Keywords:** Media Framing; Anti-TNI Law Protest; detikJatim, Social Movement, Press Social Responsibility

## **ABSTRAK**

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang disahkan DPR RI pada 20 Maret 2025 memicu demonstrasi di Surabaya yang berujung bentrok dengan aparat. Latar Dwifungsi ABRI dan proses legislasi yang cepat memunculkan kekhawatiran publik terhadap kembalinya dominasi militer. Media siber memegang peran penting membentuk opini publik melalui pembingkai. Penelitian ini menggunakan metode framing Robert M. Entman terhadap 24 berita detikJatim. Hasilnya, detikJatim cenderung membingkai pendemo secara negatif: menyoroti aksi sebagai gangguan ketertiban (define problems), memandang pendemo sebagai pemicu bentrok (diagnose causes), memberi citra anarkis pada pendemo (moral judgement), dan menonjolkan tindakan tegas aparat (treatment recommendations). Framing tersebut memperlemah legitimasi gerakan sipil dan menunjukkan kurangnya penerapan tanggung jawab sosial pers. Diperlukan liputan media yang lebih berimbang dan independen.

**Kata Kunci:** Framing Media; Demonstrasi Tolak UU TNI; detikJatim; Gerakan Sosial; Tanggung Jawab Sosial Pers

## **PENDAHULUAN**

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 20 Maret 2025 memicu perdebatan publik yang tajam. Revisi ini dinilai banyak pihak membuka kembali peluang bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil melalui perluasan kewenangan dan jabatan bagi prajurit aktif. Ketakutan publik menguat karena mengingatkan pada masa lalu, terutama praktik Dwifungsi ABRI yang pada era Orde Baru menempatkan militer sebagai aktor dominan dalam politik, birokrasi, hingga kehidupan sipil.

Kekecewaan masyarakat terhadap proses legislasi yang berlangsung cepat dan tertutup turut memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai kota besar, termasuk di Surabaya. Aksi penolakan yang berlangsung pada 24 Maret 2025 menjadi salah satu yang paling disorot karena diwarnai bentrokan antara pendemo dengan aparat keamanan. Peristiwa ini menandai kembalinya ketegangan antara aspirasi masyarakat sipil dan otoritas negara.

Dalam konteks inilah, peran media menjadi sangat penting. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menentukan bagaimana publik memahami peristiwa melalui proses pbingkaian atau framing. Cara media

memilih isu, menonjolkan sudut pandang tertentu, atau menyusun narasi dapat memengaruhi legitimasi gerakan sosial maupun kebijakan pemerintah. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, media siber memiliki jangkauan dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan media konvensional sehingga perannya dalam membentuk opini publik menjadi semakin menentukan.

DetikJatim, sebagai salah satu portal berita daring terbesar di Jawa Timur, menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan isu ini. Intensitas pemberitaan detikJatim mengenai demonstrasi di Surabaya pada 24 Maret 2025 mendorong perlunya kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana media tersebut mbingkai peristiwa tersebut, khususnya dalam menggambarkan pendemo dan aparat keamanan.

Kajian ini penting dilakukan mengingat media di era demokrasi diharapkan dapat menjadi pilar keempat yang berperan menjaga keseimbangan kekuasaan, memberi ruang bagi suara publik, dan memastikan transparansi proses kebijakan. Analisis framing terhadap pemberitaan detikJatim diharapkan dapat mengungkap sejauh mana media menjalankan fungsi tersebut atau justru memperkuat narasi dominan yang dimiliki pihak berwenang.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola pembingkai yang digunakan detikJatim dalam memberitakan demonstrasi penolakan revisi UU TNI di Surabaya. Dengan menggunakan model framing Robert M. Entman, penelitian ini ingin melihat bagaimana media mendefinisikan masalah, menetapkan penyebab, memberi penilaian moral, serta menyarankan tindakan yang dianggap tepat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami implikasi bingkai media terhadap representasi gerakan sosial dan menilai peran media dalam menegakkan prinsip tanggung jawab sosial pers di tengah dinamika politik kontemporer.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Teori Framing**

Teori framing berangkat dari pemahaman bahwa media tidak pernah sepenuhnya netral dalam menyampaikan realitas. Media selalu melakukan proses seleksi atas fakta yang ada, menonjolkan aspek tertentu, dan menyingkirkan aspek lain, sehingga cara publik memahami suatu peristiwa sangat dipengaruhi oleh cara media mengemasnya. Robert M. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing melibatkan empat fungsi utama: menentukan masalah atau define problems, mengidentifikasi penyebab atau diagnose

causes, memberi penilaian moral atau make moral judgement, dan menyarankan langkah penyelesaian atau treatment recommendations.

Dengan mengedepankan fungsi-fungsi ini, media pada dasarnya menawarkan sudut pandang tertentu yang membimbing khalayak untuk melihat siapa yang menjadi pihak yang benar atau salah, apa yang dianggap sebagai masalah utama, dan apa solusi yang seharusnya ditempuh.

Dalam konteks pemberitaan demonstrasi penolakan revisi UU TNI, teori ini menjadi penting karena peristiwa tersebut tidak hanya soal benturan fisik antara pendemo dan aparat, tetapi juga soal pertarungan wacana mengenai peran militer di ranah sipil dan hak masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Cara media memilih kata, menulis judul, menentukan narasumber, dan menonjolkan gambar atau kutipan dapat mempengaruhi apakah publik melihat aksi tersebut sebagai perjuangan demokratis atau ancaman terhadap ketertiban umum.

### **Tanggung Jawab Sosial Pers**

Konsep tanggung jawab sosial pers menekankan bahwa media tidak sekadar berfungsi sebagai bisnis informasi yang mengejar keuntungan atau sekadar menyajikan hiburan bagi khalayak. Media memiliki kewajiban moral untuk melayani kepentingan publik dengan menyediakan

informasi yang akurat, berimbang, relevan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, media dianggap sebagai pilar keempat yang mengawasi kekuasaan negara dan menyediakan ruang bagi diskusi publik yang sehat.

Prinsip ini menjadi krusial ketika media meliput isu yang berkaitan dengan kebijakan publik yang kontroversial, seperti revisi UU TNI. Liputan yang hanya menonjolkan aspek kericuhan atau menstigma gerakan sosial sebagai pengganggu ketertiban tanpa mengangkat substansi aspirasi mereka, berarti media tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, jika media memberikan ruang bagi berbagai pandangan, termasuk suara kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, maka media dapat memperkuat proses deliberasi publik yang menjadi fondasi demokrasi.

## **Gerakan Sosial**

Gerakan sosial, menurut Sidney Tarrow (2011), adalah aksi kolektif yang muncul untuk menantang kebijakan atau struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Gerakan ini sering kali lahir sebagai respons terhadap kebijakan negara yang dianggap mengancam hak-hak masyarakat sipil atau mengekang partisipasi politik warga. Kesuksesan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi

atau strategi lapangan, tetapi juga oleh bagaimana gerakan tersebut dipersepsikan oleh publik luas.

Dalam era komunikasi massa modern, media memiliki peran sentral dalam membentuk citra gerakan sosial. Liputan yang adil dan berimbang dapat meningkatkan dukungan publik terhadap gerakan, sementara liputan yang bias atau negatif dapat memperlemah legitimasi dan mengisolasi gerakan dari simpati masyarakat. Oleh karena itu, dalam studi tentang demonstrasi penolakan revisi UU TNI, penting untuk melihat bagaimana media seperti detikJatim membingkai gerakan tersebut: apakah sebagai upaya kolektif yang sah dalam memperjuangkan demokrasi, atau sekadar sebagai ancaman bagi stabilitas dan ketertiban publik. Pilihan framing media memiliki konsekuensi langsung terhadap dinamika dukungan publik dan arah wacana politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas peristiwa sosial-politik. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran angka tetapi pada makna yang dibentuk melalui narasi berita.

Objek penelitian terdiri atas 24 artikel berita yang diterbitkan oleh

detikJatim pada 24 Maret 2025, tepat saat demonstrasi berlangsung di Surabaya. Pemilihan artikel dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dengan peristiwa yang diteliti dan cakupan yang representatif terhadap pola pemberitaan pada hari kejadian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengunduhan dan dokumentasi artikel berita daring dari situs detikJatim. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan publik, dan arsip media lain yang meliput demonstrasi sebagai sumber pembanding untuk meningkatkan validitas analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model framing Robert M. Entman. Setiap artikel ditelaah untuk menemukan pola *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendations* yang digunakan media dalam menyampaikan isu demonstrasi. Untuk memastikan keandalan temuan, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil analisis dengan pemberitaan media lain serta laporan dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi kebebasan pers.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberitaan detikJatim mengenai demonstrasi penolakan revisi Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Surabaya memiliki pola framing yang relatif homogen dan menonjolkan aspek keamanan dibandingkan dengan substansi aspirasi publik. Dari 24 artikel yang dianalisis, ditemukan kecenderungan media untuk memandang demonstrasi sebagai sumber gangguan ketertiban kota. Framing ini tidak hanya memengaruhi cara publik memahami peristiwa, tetapi juga membentuk opini yang dapat mengurangi legitimasi gerakan sosial sipil di mata masyarakat luas.

Hasil analisis dengan menggunakan model framing Robert M. Entman memperlihatkan bahwa detikJatim secara konsisten mengarahkan pembacanya pada sudut pandang yang memosisikan demonstrasi sebagai masalah keamanan yang harus segera ditangani. Pilihan kata dalam judul dan isi berita, pemilihan foto, dan kutipan narasumber semuanya mengarah pada penonjolan konflik dan bentrokan antara pendemo dan aparat keamanan. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga menafsirkan dan membingkai realitas sesuai dengan sudut pandang tertentu.

Temuan ini memperlihatkan bagaimana media daring, yang memiliki jangkauan luas dan kecepatan distribusi tinggi, memainkan peran penting dalam mempengaruhi dinamika wacana publik di era digital. Peran media tidak netral; ia

menjadi arena pertarungan narasi antara aspirasi masyarakat sipil dan narasi resmi negara. Pembahasan berikut menguraikan secara lebih mendalam pola framing detikJatim melalui tiga aspek utama.

### **1. Bingkai Demonstrasi sebagai Gangguan Ketertiban**

Pola framing yang paling menonjol adalah penempatan demonstrasi sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Dalam dimensi *define problems*, hampir seluruh artikel berita yang dianalisis menggambarkan aksi protes sebagai sumber keributan dan hambatan bagi aktivitas masyarakat kota Surabaya. Judul-judul berita seperti “Demo Tolak Revisi UU TNI Ricuh di Surabaya” atau “Bentrokan Pecah, Lalu Lintas Terganggu” menjadi penanda bagaimana media mengedepankan dimensi kekacauan

Selain pilihan kata, foto-foto yang disajikan dalam artikel juga memperkuat bingkai ini. Sebagian besar foto menggambarkan massa yang berkerumun di jalan, aparat yang berjaga dengan perlengkapan lengkap, atau momen bentrokan fisik, sementara gambar yang menunjukkan aktivitas damai seperti penyampaian orasi atau dialog antara pendemo dan aparat hampir tidak ditampilkan. Visual ini mempertegas kesan bahwa demonstrasi identik dengan kerusuhan, bukan dengan partisipasi politik

Bingkai semacam ini memiliki implikasi penting. Dengan menonjolkan aspek gangguan ketertiban, media mengalihkan perhatian publik dari akar permasalahan demonstrasi, yakni penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai mengancam prinsip supremasi sipil. Akibatnya, pembaca berita lebih cenderung melihat demonstrasi sebagai ancaman bagi kenyamanan kota daripada sebagai gerakan politik yang sah dan memiliki tujuan substantif.

### **2. Penetapan Penyebab dan Penilaian Moral**

Dalam dimensi *diagnose causes*, detikJatim cenderung menempatkan pendemo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bentrokan. Beberapa artikel menggambarkan aksi seperti blokade jalan, lemparan benda ke arah aparat, dan tindakan provokatif lainnya sebagai penyebab langsung terjadinya konflik. Sementara itu, faktor struktural yang menjadi pemicu aksi protes, seperti proses legislasi revisi UU TNI yang dinilai cepat, tertutup, dan mengabaikan aspirasi publik, jarang mendapat sorotan yang setara.

Pola ini diperkuat oleh dimensi *make moral judgement*. Dalam banyak berita, pendemo dilabeli sebagai kelompok yang “anarkis,” “mengganggu ketertiban,” atau “membuat resah masyarakat,”

sedangkan aparat keamanan digambarkan sebagai pihak yang “menjaga ketertiban” dan “mengamankan situasi.” Narasi ini memberikan legitimasi moral kepada tindakan aparat untuk melakukan penindakan tegas, sementara pada saat yang sama mengikis legitimasi moral gerakan sosial yang memprotes kebijakan publik.

Penilaian moral yang timpang ini berdampak pada pembentukan opini publik. Dengan citra yang dibentuk oleh media, pendemo lebih mudah dipersepsikan sebagai pihak yang harus dikendalikan atau ditindak, bukan sebagai warga negara yang sedang memperjuangkan hak politiknya. Akibatnya, dukungan publik terhadap aspirasi yang diusung oleh gerakan sosial menjadi lemah, dan wacana kebijakan yang menjadi akar permasalahan demonstrasi terpinggirkan.

### **3. Rekomendasi Tindakan dan Implikasinya bagi Demokrasi**

Dalam dimensi treatment recommendations, detikJatim lebih banyak menonjolkan langkah-langkah yang diambil aparat keamanan untuk mengendalikan situasi, seperti pembubaran massa atau penangkapan individu yang dianggap memicu keributan. Hampir tidak ada pemberitaan yang memberikan ruang bagi gagasan penyelesaian politik atau dialog antara pemerintah dan masyarakat

sipil sebagai solusi jangka panjang.

Fokus yang berlebihan pada narasi penegakan ketertiban mencerminkan pandangan yang memprioritaskan stabilitas keamanan di atas prinsip partisipasi publik. Hal ini dapat mengabaikan hak warga untuk menyampaikan kritik dan membatasi ruang deliberasi publik yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

Implikasinya bagi demokrasi sangat signifikan. Dengan mengabaikan dimensi politik dari demonstrasi dan mengedepankan perspektif keamanan, media justru mengikis kualitas diskusi publik dan melemahkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara. Dalam jangka panjang, framing semacam ini dapat merugikan proses demokratisasi karena membatasi peran masyarakat sipil sebagai pengontrol kekuasaan.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa framing yang dilakukan detikJatim dalam pemberitaan demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Surabaya menunjukkan kecenderungan media untuk memusatkan perhatian pada narasi keamanan dan ketertiban publik, sementara substansi aspirasi politik yang melatarbelakangi demonstrasi tidak mendapatkan ruang yang memadai. Analisis terhadap 24 artikel yang

terbit pada 24 Maret 2025 memperlihatkan pola pembingkai yang konsisten dengan sudut pandang yang menempatkan demonstrasi sebagai ancaman terhadap stabilitas kota. Dalam dimensi define problems, media mendefinisikan aksi protes sebagai sumber keriuhan dan gangguan ketertiban; pada diagnose causes, pendemo diposisikan sebagai pihak yang memicu bentrokan; dalam make moral judgement, media memberi kesan bahwa tindakan aparat keamanan memiliki legitimasi moral untuk bertindak tegas; sedangkan pada treatment recommendations, solusi yang ditonjolkan adalah langkah-langkah represif demi menjaga ketertiban, bukan dialog atau upaya penyelesaian politik terhadap permasalahan yang diangkat oleh gerakan sosial.

Pola framing tersebut memperlihatkan bagaimana media dapat secara tidak langsung membentuk persepsi publik yang cenderung memandang demonstrasi sebagai ancaman ketimbang sebagai bagian dari proses demokrasi. Dengan demikian, detikJatim belum sepenuhnya menjalankan prinsip tanggung jawab sosial pers yang menghendaki keberimbangan liputan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks kebijakan publik yang berdampak luas seperti revisi UU TNI, media memiliki kewajiban untuk tidak hanya

menyampaikan peristiwa yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengangkat akar masalah yang memicu aksi kolektif masyarakat sipil.

Dominasi narasi keamanan yang muncul dalam liputan detikJatim memiliki implikasi penting terhadap kualitas demokrasi. Dengan meminggirkan substansi tuntutan publik, media secara tidak langsung memperlemah posisi gerakan sosial dalam memperjuangkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan transparan. Kondisi ini berisiko mempersempit ruang diskusi publik dan memperkuat narasi resmi negara, yang sering kali menekankan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Padahal, media sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya menjadi arena yang menjamin keberagaman suara dan memfasilitasi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Hasil penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa media daring seperti detikJatim memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, bukan hanya melalui kecepatan dan jangkauan pemberitaan, tetapi juga melalui pilihan bingkai yang digunakan dalam mengemas narasi politik. Oleh karena itu, dalam meliput isu-isu kontroversial dan berdampak luas seperti revisi UU TNI, media dituntut untuk menjaga independensi, menghindari bias yang memperkuat narasi dominan, dan

memberikan ruang yang setara bagi berbagai pihak yang terlibat. Keberhasilan media menjalankan tanggung jawab sosialnya tidak hanya mempengaruhi kualitas pemberitaan, tetapi juga menjadi penentu bagi kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai framing pemberitaan detikJatim terhadap demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Surabaya, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang dapat melibatkan berbagai pihak. Rekomendasi ini tidak hanya ditujukan bagi media daring sebagai penghasil informasi, tetapi juga bagi gerakan sosial, pemerintah, dan akademisi agar tercipta ekosistem komunikasi publik yang lebih demokratis. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pemberitaan media, meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan, serta memperkuat peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

### **1. Bagi Media Daring**

Media daring seperti detikJatim perlu memperkuat penerapan prinsip tanggung jawab sosial pers dengan menyajikan liputan yang lebih berimbang. Dalam melaporkan isu-isu sensitif seperti demonstrasi politik, media hendaknya tidak

hanya menonjolkan kericuhan dan tindakan aparat, tetapi juga mengangkat konteks kebijakan yang menjadi akar protes. Liputan yang inklusif dapat membantu publik memahami isu secara lebih komprehensif dan meningkatkan kepercayaan terhadap media.

### **2. Bagi Gerakan Sosial dan Masyarakat Sipil**

Organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih efektif agar substansi tuntutan mereka dapat disampaikan secara jelas dan tidak tereduksi oleh framing media yang cenderung menonjolkan aspek konflik. Upaya membangun hubungan yang lebih terbuka dengan media, menyediakan data yang dapat diverifikasi, serta mengedepankan bentuk protes yang damai akan membantu memperkuat legitimasi gerakan di mata publik.

### **3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Pemerintah perlu memperkuat prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan, khususnya pada isu-isu strategis seperti revisi UU TNI. Dengan melibatkan masyarakat sipil secara lebih luas dan transparan, potensi ketegangan sosial dapat diminimalkan, dan proses legislasi akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata

publik.

#### 4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk studi lebih lanjut mengenai pola framing media dalam isu-isu politik dan sosial di Indonesia. Akademisi disarankan melakukan penelitian komparatif antar media atau platform media sosial untuk memperluas pemahaman tentang dampak framing terhadap opini publik. Kajian tentang praktik jurnalisme yang berimbang juga dapat memperkaya wacana etika media di era digital.

Rekomendasi ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia memerlukan sinergi antara media yang bertanggung jawab, masyarakat sipil yang aktif dan komunikatif, serta pemerintah yang terbuka dan inklusif. Ketiga aktor ini memiliki peran penting dalam membangun ruang publik yang sehat, sehingga proses kebijakan dapat berlangsung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Fandi, H. (2021). *Pengantar jurnalistik*. BILDUNG.

Araf, A., Aliabbas, A., Adiputra, A. M., Aprilia, A. Y., Mengko, D. M., Budiawan, E. S., Mabruhi, G., Ahmad, H., & Sujono,

S. (2019). *Peran internal militer: Problem tugas perbantuan TNI*. Imparsial.

Baran, S. J., & Davis, D. K. (2014). *Teori komunikasi massa: Dasar, pergolakan, dan masa depan* (5th ed.). Penerbit Salemba Humanika.

Basuki, A. Y. (2014). Reformasi TNI: Pola, profesionalitas, dan refungsionalisasi militer dalam masyarakat. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 19(2).

<https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.1243>

Budianto, H. (2012). *Komunikasi dan konflik di Indonesia*. PT Showcase Indonesia Dotcom.

DeFleur, M., & DeFleur, M. H. (2016). *Mass communication theories* (0 ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315663593>

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.

detikcom. (2025). Berita hari ini terkini di Jawa Timur—detikJatim.

<https://detik.com/jatim>

Dewan Pers. (2025). *Data perusahaan pers*. <https://dewanpers.or.id/data>

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.

*Journal of Communication*, 43(4), 51–58.

<https://doi.org/10.1111/j.1460->

2466.1993.tb01304.x

Hadi, I. P., Wahjudianata, M., &  
Indrayani, I. I. (2021). *Komunikasi massa*.  
CV. Penerbit Qiara Media.

Hamna, D. M., & Dewanty, N. (2023).  
Analisis framing pemberitaan *Tribun-*  
*timur.com* tentang demonstrasi mahasiswa  
Universitas Muhammadiyah Makassar.  
*Jurnal Komunikasi*, 5(2).

Karlina, D. A. (2020). Mengenal dampak  
positif dan negatif internet untuk anak  
pada orang tua. *Jurnal Pasca Dharma*  
*Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 53–56.  
<https://doi.org/10.17509/jpdpm.v1i2.24002>

Kementerian Pertahanan RI, Badan  
Penelitian dan Pengembangan. (2025a,  
April 23). Analisis revisi UU TNI untuk  
mendukung kepentingan nasional.  
[https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/  
04/23/analisis-revisi-uu-tni-untuk-  
mendukung-kepentingan-nasional.html](https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tni-untuk-mendukung-kepentingan-nasional.html)

Kementerian Pertahanan RI, Badan  
Penelitian dan Pengembangan. (2025b,  
April 26). Analisis revisi UU TNI dari  
sudut pandang pertahanan negara.  
[https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/  
04/26/analisis-revisi-uu-tni-dari-sudut-  
pandang-pertahanan-negara.html](https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/26/analisis-revisi-uu-tni-dari-sudut-pandang-pertahanan-negara.html)